

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor Roda Empat dan Perhitungan Pajak Progresif, Kendaraan Roda Empat dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kantor Bersama SAMSAT Kedung Cowek Surabaya Utara mengalami peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda Empat tahun 2018 sebesar Rp 291.449.960.932 dan di tahun 2019 Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat memiliki penerimaan lebih besar sebesar Rp 301.836.252.441 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat mengalami kenaikan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar Rp 10.386.291.509.
2. Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Roda Empat Tahun 2018 sebesar Rp 9.002.509.900 sedangkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Tahun 2019 sebesar Rp 8.074.925.000. Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Roda Empat mengalami penurunan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar Rp 947.584.000.
3. Target PAPBD (Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2018 sebesar Rp 304.815.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 366.694.724.282 atau 120,30 % sedangkan Target PAPBD



Tahun 2019 sebesar Rp 352.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 378.493.711.441 atau 107,53%.

4. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagian pungutan PKB Tahun 2018 sebesar Rp 6.448.692.325.911 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.400.000.000.000.
5. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagian pungutan PKB Tahun 2019 sebesar Rp 6.890.439.193.872 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.350.000.000.000, peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagian pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 sebelumnya sebesar Rp 6.448.692.325.911 atau sekitar Rp 441.746.867.961 (106,85%)



5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Memberi sanksi tegas kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua yang cc nya diatas 250 yang dibeli Wajib Pajak secara bekas untuk menghindari Pajak Progresif.
2. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : perlunya kesadaran akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan juga kesadaran untuk melaporkan Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang memiliki kendaraan roda empat lebih dari satu atau roda dua yang cc nya diatas 250 untuk menetapkan tarif Pajak Progresif sesuai kepemilikan atau membalikkan nama kepemilikan kendaraan bermotor roda empatnya ke anggota keluarga yang lain agar terhindar dari pajak Progresif.
3. Bagi Wajib Pajak yang menjual kendaraan bermotor roda empat atau roda dua yang cc nya diatas 250 : laporkan kendaraan yang Wajib Pajak ingin jual ke Kantor Bersama SAMSAT terdekat apabila wajib pajak ingin menjual kendaraannya, dan segera lakukan balik nama kepemilikan kendaraan bermotor agar tidak terkena tarif Pajak Progresif apabila Wajib Pajak ingin membeli kendaraan roda empat atau roda dua yang cc nya diatas 250 baru.
4. Untuk Pihak SAMSAT KEDUNG Cowek Surabaya Utara
Melakukan sosialisasi baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik mengenai Pajak Progresif untuk memberikan pengertian kepada wajib pajak akan pentingnya melakukan pelaporan kepemilikan



kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk kendaraan kedua maupun kedua dan seterusnya.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Christiana Heryanto, Lydia, Chaya Wijaya, Williem. 2017. Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 19(1a): 266-273.

Dwichayani Salmon, Gita, Elim, Inggriani. 2015. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama SAMSAT Tondano. *Jurnal EMBA*. 3(1): 674-684.

Febriati. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. *Jurnal Eksos Volume 7, No 2.tax*.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Andi.

Melissa Layadi. 2016. Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Antara Sebelum Dengan Sesudah Penetapan Pajak Progresif Di SAMSAT Bulukumba. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.

Muda, Markus. 2018. Analisa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL) Sorong. *Jurnal Pritis AKP*. 3(1): 1-13.

Novella, Christye, Fung Njit, Tjhai. 2017. Analisis Perhitungan Penyetoran Pelaporan dan Pencatatan Pph Pasal 21 dan Ppn PT X. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 19(1a): 335-347.

Novita, David, Harijanto. 2015. Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims di Kabupaten Minahasa. Hal. 34-44

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 dan Tahun 2018

Pudyat, Sri. 2003, *Hukum Pajak edisi revisi*, Yogyakarta

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Yogyakarta : Salemba Empat.

Tungka, Melinda, Sabijono, Harijanto. 2015. Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. 3(2): 928-937.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empa, Jakarta

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 11*. Salemba Empat. Jakarta

Yuliandhani Pratiwi, Vicky, Kumadji, Srikandi, Effendy, Idris. 2016. Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas PNS TNI AD POMDAM V/BRAWIJAYA SURABAYA. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 10(1).

Yenni Latrini, Made, Gayatri. 2018. Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 25(2): 1591-1606.

